No. : 1709.21/Auriga-I/PRO/2017
Tanggal : 2 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Memperbaharui Kebijakan Kelistrikan
Lampiran : 1 Eksemplar Hasil Kajian Sebagai Bahan Pendukung

Kepada **Yth. Presiden Republik Indonesia**
Di Istana Negara.

Dengan hormat,

Kami, Yayasan Auriga Nusantara (www.auriga.or.id), sebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bertujuan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui dorongan perbaikan tata kelola, pembaharuan kebijakan, dan penegakan hukum, bersama dengan Oil Change International (www.priceofoil.org), sebuah lembaga yang berbasis di Washington, Amerika Serikat, yang melakukan riset, komunikasi, dan advokasi untuk mengungkapkan biaya-sebenarnya bahan bakar fosil dan memfasilitasi transisi menuju energi bersih, telah melakukan kajian terhadap program pembangunan pembangkit listrik 35 GW. Kajian yang kami lakukan berfokus pada risiko jaminan pemerintah terhadap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Kajian tersebut mengungkap potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah karena kebijakan pemerintah yang memberikan serangkaian jaminan terhadap pembangunan PLTU tersebut. *Sepenuhnya kajian tersebut dapat dilihat pada dokumen terlampir.*

Potensi kerugian tersebut menambah dampak akibat kebijakan pemerintah yang masih bertumpu pada energi kotor dan mahal batubara. Padahal, dengan tingkat produksi dan ekspor seperti sekarang ini, penambahan PLTU melalui proyek listrik 35 GW diproyeksikan batubara Indonesia akan habis pada tahun 2036, atau sebelum semua PLTU habis masa aktifnya[1].

Batubara seharusnya tidak menjadi pilihan utama dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Polusi udara akibat pembakarannya dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan warga. Di sisi lain, emisi karena pembakaran batubara menjadi penyumbang signifikan perubahan iklim global. Pada tahun 2000 emisi karbon dari batubara Indonesia sebesar 56.454.652 ton, dan pada 2013 meningkat tajam menjadi 142.318.307 ton[2]. Sehingga, tambahan 21 GW PLTU batubara melalui proyek listrik 35 GW tersebut akan membahayakan pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia kepada komunitas global untuk menurunkan emisi karbon 26 - 41 % pada tahun 2030.

Dengan menimbang hal-hal di atas, AURIGA merekomendasikan pemerintah sesegera mungkin keluar dari jebakan ketergantungan terhadap batubara, atau yang biasa kami sebut sebagai ***quit coal***, dan beralih ke energi terbarukan, atau biasa kami sebut dengan ***going renewable***. Sebagaimana ditunjukkan pada publikasi kami terlampir, banyak negara lain yang bahkan sudah mulai meninggalkan batubara dan beralih ke energi terbarukan.

Pada konteks Indonesia, *quit coal* menuju *going renewable* adalah tetap mengoperasikan PLTU yang sudah terlanjur ada, **tanpa harus menambah PLTU baru**, dan menyiapkan masa transisi menuju energi terbarukan, yang langkah-langkahnya sebagaimana berikut:

1. **Tidak menerbitkan izin tambang batubara baru** (*no new permit for coal mining*).
   Wilayah izin pertambangan batubara (IUP dan PKP2B) telah mencapai 19,5 juta hektar, yang telah mencakup hampir seluruh wilayah berpotensi batubara yang ada.

AURIGA
Bukit Cimanggu City
Green Land Residence, Blok HH-17 No.16
Bogor, Jawa Barat
Fax: 0251-7551158
www.auriga.or.id

2. **Tidak memperkenankan penambahan lubang tambang baru di dalam wilayah izin yang kini sudah ada** (*no new pit within current permit area*).
   Bila ekspor ditiadakan, produksi batubara saat ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Di sisi lain, analisis citra satelit Landsat (2016) yang dilakukan AURIGA menunjukkan hanya 10,47% wilayah izin batubara yang telah ditambang.

3. **Larangan ekspor batubara** (*coal export ban*) **sehingga sepenuhnya produksi batubara diperuntukan untuk kebutuhan dalam negeri (DMO –** *domestic market obligation*).
   Pada saat ini hampir 70% produksi batubara dijual ke luar negeri, yang bahkan tak jarang mengakibatkan pasokan kebutuhan dalam negeri mengalami kekurangan. Padahal, batubara pada dasarnya lebih dari sekedar komoditas karena bermuatan energi yang merupakan elemen mendasar ketahanan nasional, dan juga ekspor bahan mentah seperti batubara merupakan subsidi terhadap industrialisasi di negara tujuan ekspor tersebut.

4. **Re-design Kebijakan Energi Nasional yang berbasis pulau dan potensi lokalnya, serta mencakup desain interkoneksi energi antar-pulau di Indonesia**.
   Hal ini perlu dilakukan karena; (i) kebijakan energi saat ini masih mengedepankan energi batubara; (ii) Rancangan Umum Energi Nasional belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kandungan energi regionalnya seperti Pulau Jawa semestinya tidak mengedepankan PLTU batubara tapi seharusnyalah berbasis pada energi terbarukan seperti panas bumi, angin, dan surya; (iii) Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) masih belum diikuti oleh Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN); (iv) Belum adanya panduan rinci penyusunan Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan arahan RUEN.

5. **Memperbaharui dan mengharmoniskan semua kebijakan dan peraturan perundangan sehingga berpihak pada energi terbarukan**, termasuk membangun mekanisme insentif kepada energi terbarukan (dan disinsentif kepada energi batubara).

6. **Membesarkan alokasi pembiayaan dan investasi energi terbarukan.**

Demikian kami sampaikan, kiranya berkenan. Terima kasih.

Hormat Kami,

Timer Manurung
Ketua Yayasan

AURIGA
Bukit Cimanggu City
Green Land Residence, Blok HH-17 No.16
Bogor, Jawa Barat
Fax: 0251-7551158
www.auriga.or.id

AURIGA is a foundation and movement to conserve biodiversity and its habita for worthy environment and human welfare.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Staf Kepresidenan
8. Komisi VII DPR RI
9. Komisi VIII DPR RI
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
11. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12. Media

---

[1] PwC. 2016. *Supplying and Financing Coal-Fired Power Plants in the 35 GW Programme*

[2] Data http://signsmart.menlhk.go.id yang disampaikan oleh Krisfianti L. Ginoga sebagaimana dikutip http://sains.kompas.com/read/2015/07/03/19453981/Batubara.dan.Transportasi.Penyumbang.Emisi.Terbesar.Sektor.Energi

AURIGA
Bukit Cimanggu City
Green Land Residence, Blok HH-17 No.16
Bogor, Jawa Barat
Fax: 0251-7551158
www.auriga.or.id